

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak contoh di sekitar kita membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan otak saja, atau banyak memiliki gelar yang tinggi belum tentu sukses berkiprah di dunia pekerjaan. Bahkan seringkali yang berpendidikan formal lebih rendah ternyata banyak yang lebih berhasil. Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal saja, padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat ini begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun karirnya terhambat atau lebih buruk lagi, tersingkir, akibat rendahnya kecerdasan emosional mereka.

Dalam perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat ini membuat sejumlah instansi atau organisasi dituntut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dimana sumber daya manusia mempunyai peranan yang besar dalam suatu organisasi. Sehingga sumber daya manusia sangat mempengaruhi kelangsungan suatu instansi atau organisasi, karena sumber daya manusia merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran jalannya kegiatan sebuah instansi atau organisasi.

Kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai dimana pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi bawahan agar bekerja dengan baik sehingga nantinya tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai. Menurut Badeni (2013: 2), kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Robbins dan Judge (2015: 410) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Peran kepemimpinan transformasional dianggap paling cocok dari sekian banyak model kepemimpinan yang ada. Konsep kepemimpinan transformasional pertama kali dikemukakan oleh James Mc Gregor Burns pada tahun 1978, dan selanjutnya dikembangkan oleh Bernard Bass dan para pakar perilaku organisasi lainnya. Hughes et al. (2012:542) mengemukakan bahwa pemimpin transformasional memiliki visi, keahlian retorika, dan pengelolaan kesan yang baik dan menggunakannya untuk mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pengikutnya.

Berdasarkan kajian kepemimpinan tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai kepemimpinan berdasarkan pendekatan transformasional. Pendekatan transformasional merupakan pendekatan atau perspektif yang paling populer yang digunakan dalam mempelajari kepemimpinan pada saat ini, serta dipandang sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Hemsworth et al. (2013) juga menyatakan, gaya kepemimpinan transformasional mendapatkan perhatian penuh selama dekade terakhir dalam berbagai obyek penelitian seperti , rumah sakit, perbankan, olahraga, penjualan, kepolisian, manufaktur dan pemerintah. Pemerintah Indonesia membangun gaya kepemimpinan transformasional bagi pemimpin-pemimpin organisasi pemerintah, termasuk di Balai Diklat Industri melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim). Asmoko (2015) menganalisis peran pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) dalam rangka pengembangan kepemimpinan transformasional menyatakan diklatpim dapat menunjang pengembangan kepemimpinan transformasional. Asmoko (2015) juga menyatakan bahwa inti dari

kompetensi kepemimpinan dalam diklatpim tersebut adalah terbentuknya pemimpin yang mampu melakukan perubahan.

Menurut Robbins dan Judge (2013:382), pemimpin transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. Pemimpin transformasional menaruh perhatian terhadap kebutuhan pengembangan diri para pengikutnya, mengubah kesadaran para pengikut atas isu-isu yang ada dengan cara membantu orang lain memandang masalah lama dengan cara yang baru, serta mampu menyenangkan hati dan menginspirasi para pengikutnya untuk bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan bersama.

Dalam otonomi daerah, pimpinan memegang peran yang sangat penting dalam mengelola serta memajukan daerah yang dipimpinnya. Perencanaan strategi sangat vital, karena disanalah akan terlihat dengan sangat jelas bahwa peran kepala daerah dalam mengkoordinasikan semua unit kerjanya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 Tahun 2015).

Karena laporan keuangan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan secara efektif. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan

keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan, sehingga memenuhi tujuannya, antara lain :Relevan, Andal, DapatDibandingkan, DapatDipahami. Demi meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan tersebut perlu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)(Warsito:2010). Informasi yang terdapat dalam laporan keuang bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari pelaporan keuangan yang menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang- undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansidan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus di audit dan dalam hal ini di audit oleh BPK. Laporan keuangan di audit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah memiliki kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan. (Dezan Firman Gunawan,2017)

Meskipun seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparatur pemerintahnya itu sendiri (Jannaini,2012:4)

Tabel1.1

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015-2019 Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TM P	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	W D P	TM P	TW	Total
2015	52%	33%	15%	0%	100%	18%	64%	17%	1%	100%	34%	58%	8%	0%	100%
2016	48%	45%	6%	0%	100%	26%	61%	10%	3%	100%	62%	38%	3%	0%	100%
2017	76%	21%	3%	0%	100%	41%	50%	8%	1%	100%	60%	40%	0%	0%	100%
2018	85%	15%	0%	0%	100%	55%	37%	7%	1%	100%	66%	33%	1%	0%	100%
2019	91%	9%	0%	0%	100%	66%	29%	5%	0%	100%	78%	21%	1%	0%	100%

Sumber : IHPS BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat kenaikan opini dari tahun 2015 terjadi pada seluruh tingkat pemda. Pada Pemerintah Provinsi, opini WTP bertambah dari 29 LKPD (85%) menjadi 31 LKPD ditahun 2016 (91%). Begitupula untuk Pemerintah Kabupaten yang bertambah dari 224 LKPD (54%) Menjadi 272 LKPD (66%), dan pada Pemerintah Kota dari 60 LKPD (65%) menjadi 72 LKPD (78%).

Fenomena yang terjadi tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz (2015) memuat ringkasan dari 666 objek pemeriksaan, terdiri dari atas 117 objek pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 objek BUMN dan Badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, terdiri atas 607 objek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan atas 666 objek pemeriksaan tersebut, BPK menemukan temuan yang memuat 15.434 permasalahan, temuan itu meliputi 51,12% permasalahan, masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun dan 48,88% masalah soal kelemahan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari masalah ketidakpatuhan tersebut berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan (atau berdampak) finansial senilai Rp 21,62 triliun.(Arliando Habib Pratama-detikfinance, 2015)

2. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan pemerintah daerah di Indonesia adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dan penyimpangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang menjurus ke tindak pidana korupsi (Asmara, 2017).

Kabupaten Buleleng juga berupaya dalam meningkatkan proses pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran di masing-masing kecamatan. Jumlah kecamatan yang ada di Buleleng hingga kini sebanyak 9 kecamatan , dari 9 kecamatan terdiri dari 19 kelurahan dan dari keluraham terdiri atas 129 desa. Dilansir dari situs Wikipedia, daftar Kantor Camat di Kabupaten Buleleng, yaitu : 1. Kantor Camat Busung Biu, 2. Kantor Camat Gerokgak, 3. Kantor Camat Seririt, 4. Kantor Camat Banjar, 5. Kantor Camat Buleleng, 6. Kantor Camat Sukadasa, 7. Kantor Camat Sawan, 8. Kantor Camat Tejakula, dan 9. Kantor Camat Kubutambahan.

Adapun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 6 Undang-Undang No. 7 tahun 2003 tentang bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. Dalam laporan keuangan perlu adanya profesionalisme pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai laporan keuangan daerah menyebutkan bahwa: “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode

pelaporan”. Informasi yang diberikan melalui laporan keuangan sangat bermanfaat, jika informasi yang disajikan mendukung sekaligus sebagai perencanaan, pengendalian dan pengambilan suatu keputusan. Sehingga dalam hal ini karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik ini memiliki empat sangat dipergunakan dalam melakukan laporan keuangan yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, seorang pemeriksa harus memiliki jiwa kecakapan profesional atau yang sering disebut dengan istilah *professionalisme*. Menurut Suantara (2014) *professionalisme* merupakan tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari dalam jiwa seseorang yang profesional yang senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja yang profesional. Profesionalisme sendiri dalam pengelolaan laporan keuangan daerah sangat berperan penting untuk mencegah *fraud* atau kecurangan yang bisa terjadi dalam laporan keuangan. Dalam hal penyajian laporan yang mengungkink keterandalan serta ketepatan waktu laporan keuangan pemerintahan dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Untuk itu dalam instansi atau organisasi berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan sistem informassi akuntansi agar untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola laporan keuangan, serta menyalurkan informasi keuangan kepada pihak pelayanan publik.

Menurut Baridwan (2008:182), sistem adalah suatu kerangka dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan, sedangkan prosedur suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya

perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi. Mulyadi (2013:5), sistem adalah sesuatu jaringan yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal. Biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penugasan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sehingga terjadinya sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung adanya sistem informasi akuntansi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan.

Kualitas pada laporan keuangan merupakan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan serta harus memahami sistem akuntansi. Disini pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas guna mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bersangkutan. Sehingga perlu adanya tingkat kecerdasan emosional, kepemimpinan transformasional, profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang ketat guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, dalam tingkat kecerdasan emosional serta pemanfaatan sistem informasi yang tepat didukung dengan keahlian personil (pegawai) yang beroperasi dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti didapat kesimpulan antara lain: menurut Zulfardiansyah (2014) penelitiannya menunjukkan bahwa profesionalisme, gaya kepemimpinan, dan kecerdasan emosi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada SKPD

Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil penelitian Kartika (2018) didapatkan Hasil bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada SKPD Kabupaten Badung.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian Shofian (2011) ini antara lain bahwa:

1. Kepemimpinan transformasional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap budaya organisasi;
2. Budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; dan
3. Kepemimpinan transformasional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Hasil penelitian Diani (2014) menunjukkan bahwa:

1. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; dan
3. Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

peneliti yang saya lakukan dengan masukan variabel yang berbeda dengan harapan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji tingkat kecerdasan emosional, kepemimpinan transformasional, profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai apakah laporan yang disajikan sudah berkualitas dan sesuai dengan standar yang

ditetapkan pemerintah. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kecerdasan Emosional, Kepemimpinan Transformasional, Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kualitas Laporan Keuangan” (Studi Kasus pada Kantor Camat se-Kabupaten Buleleng).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi terhadap kinerja pegawai pada kualitas laporan keuangan (Studi Kasus Kantor Camat se-Kabupaten Buleleng), sebagaimana berikut:

- 1.2.1 Adanya tuntutan profesionalisme dalam mengelola laporan keuangan.
- 1.2.2 Bagaimana cara meningkatkan kualitas laporan keuangan
- 1.2.3 Bagaimana cara untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku
- 1.2.4 Bagaimana memanfaatkan Sistem informasi keuangan untuk kualitas laporan keuangan.?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah terdapat banyak factor yang dapat mempengaruhi rendahnya kinerja pegawai pada kualitas laporan keuangan yang dilaksanakan pada Kantor Camat Se-kabupaten Buleleng untuk menghindari adanya penyalahgunaan serta terjadinya kesalahpahaman dalam pengelolaan keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari paparan singkat yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi pedoman pada penelitian selanjutnya, sebagaimana berikut:

- 1.4.1 Adakah Pengaruh tingkat kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai pada kualitas laporan keuangan?
- 1.4.2 Adakah Pengaruh kepemimpinan transpormasional terhadap kinerja pegawai pada kualitas laporan keuangan?
- 1.4.3 Adakah Pengaruh Tingkat profesional pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pegawai pada kualitas laporan keuangan?
- 1.4.4 Adakah Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai pada kualitas laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh tingkat kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai pada kualitas laporan keuangan.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transpormasional terhadap kinerja pegawai pada kualitas laporan keuangan.
- 1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh profesional pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pegawai pada kualitas laporan keuangan.

- 1.5.4 Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai pada kualitas laporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bahwa dapat memberikan gambaran bagaimana individu dapat memaksimalkan utilitasnya dalam hal ini adalah profesionalisme, gaya kepemimpinan dan sumber daya sehingga dapat memaksimalkan kinerja yang tertuang dalam laporan keuangan berkualitas sehingga dapat memenuhi ekspektasi dari principal dalam hal ini adalah para stakeholder (Pemerintah). dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana cara mewujudkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan aturan undang undang yang berlaku.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1.6.2.1 Bagi akademik, dapat mengimplentasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat dari perguruan tinggi yang tentu sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
- 1.6.2.2 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan laporan keuangan keuangan yang berkualitas sebagaimana diisyaratkan dalam aturan perundang undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai laporan keuangan daerah.